



**LKjIP**

**(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)**

**DINAS KOPERASI DAN UKM**

**KABUPATEN BANGGAI**

**TAHUN 2018**

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Tahun 2018 merupakan wujud pertanggung jawaban manajerial Pimpinan Satuan Kerja yang disarankan pada Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai 2016-2021. Dengan demikian sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Banggai yang mengembantugas dibidang pengembangan Koperasi dan UKM. Substansi LKjIP ini sebenarnya mengacu pada RENSTRA Pemerintah Kabupaten Banggai. Oleh karena itu keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM merupakan kontribusi yang sangat berarti bagi keberhasilan PEMDA Kabupaten Banggai dalam pembangunan Koperasi dan UKM.


Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dalam pembinaan dan pengembangan KUKM, dengan harapan hasil kerja tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Banggai secara khusus bagi gerakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan LkjiP ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran bagi perbaikan sangat kami harapkan.

Semoga LKjIP Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018 ini memberikan sumbangan yang berarti bagi Pemerintah Kabupaten Banggai dalam pelaksanaan dan rencana tindak perbaikan kinerja pembinaan Koperasi dan UKM di masa mendatang.

Luwuk, 12 Februari 2019

Pjt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM  
Kabupaten Banggai



**RUDI PURWANA K BULLAH, S. Sos**  
Pembina Tkt I, IV/b  
NIP.:19710601 199903 1 005

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

LKjIP Tahun 2018 merupakan laporan tahun terakhir dari sirkulasi lima tahunan RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. Disamping itu penyusunan LKjIP Tahun 2018 juga mengacu pada RENSTRA PEMDA Kabupaten Banggai. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, maka semua materi dan substansi dalam RENSTRA dan LKjIP Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai mengacu sepenuhnya kepada RENSTRA PEMDA Kabupaten Banggai. Oleh karena itu keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM merupakan kontribusi bagi keberhasilan PEMDA Kabupaten Banggai dalam bidang Koperasi dan UKM.

LKjIPTahun 2018 menyajikan semua capaian kinerja dari semua sasaran dan kegiatan selama Tahun 2018. Penilaian capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan target atau rencana dalam rencana kinerja Tahun 2018 dengan realisasi. Untuk melakukan penilaian capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi dari indikator kinerja input, output dan outcome.

Untuk penyusunan LKjIP Tahun 2018 ini, penilaian capaian kinerja ditekankan **kepada pencapaian kinerja sasaran**. Hal ini sesuai dengan semangat akuntabilitas Instansi Pemerintahan adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawab kan keberhasilan/**kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik**. Adapun pencapaian kinerja kegiatan (dengan indikator kinerja input, output dan outcome) akan diselaraskan dengan pencapaian kinerjasasarannya.

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai telah melaksanakan **40 kegiatan** dalam **10 program** untuk memenuhi **4 sasaran Stratejik** dengan Dana APBD yang dianggarkan sebesar **Rp. 6.761.775.027** Dana tersebut dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar **Rp. 3.580.097.927,-** dan belanja langsung **Rp. 3.181.677.100,-** dengan realisasi pencapaian untuk belanja tidak langsung **Rp. 3.,266.750.414,-** atau 91.25 % dan belanja langsung sebesar **Rp.3.162.592.093,-** telah mencapai 99.71%.

Capaian kinerja selama Tahun 2018 menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM telah berhasil memenuhi **4 sasaran strategik** dari **4 tujuan strategik** yang ditargetkan atau mencapai 100%.

Sasaran strategik yang berhasil dicapai adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan KUKM
2. Meningkatkan Jiwa Kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro
3. Meningkatkan Daya saing Produk Koperasi dan Usaha Mikro
4. Meningkatkan Jumlah SDM, KUKM yang berkualitas

Keseluruhan kegiatan tersebut telah mencapai sasaran sebagaimana yang direncanakan. Hal ini karena dukungan dan kerja keras seluruh jajaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai.

Meskipun telah mencapai sasaran optimal sebagaimana yang diinginkan namun langkah perbaikan masih akan terus dilaksanakan melalui antara lain :

1. Perlu tetap melakukan identifikasi mengenai kondisi KUKM
2. Melakukan bimbingan teknis kepada pengurus mengenai organisasi, manajemen dan akuntansi agar dapat di implementasikan dalam kehidupan berkoperasi sehingga secara bertahap koperasi mampu berperan dalam perekonomian daerah.
3. Melakukan upaya perkuatan permodalan dan pengelolaan usaha yang layak pada KUMKM.

Diharapkan dengan tersusunnya LKjIP ini dapat dijadikan alat pembanding dalam pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai untuk tahun mendatang. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaannya.

Luwuk, 12 Februari 2019

Pt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM  
Kabupaten Banggai



RUDI PURWANA K BULLAH, S. Sos  
Pembina Tkt I, IV/b  
NIP.:19710601 199903 1 005

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	v
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
1.3. Isu Strategis .....	4
1.4. Landasan Hukum .....	7
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>9</b>
2.1. Rencana Strategis .....	9
2.1.1 Visi .....	9
2.1.2 Misi .....	9
2.1.3 Tujuan dan Sasaran .....	10
2.2 Indikator Kineja Utama .....	12
2.3 Rencana Kinerja Tahunan .....	13
2.4 Perjanjian Kinerja .....	13
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>15</b>
3.1. Capaian Kinerja .....	12
3.2. Target dan Capaian .....	16
<b>BAB III    PENUTUP .....</b>	<b>22</b>
4.1. Kesimpulan .....	24
4.2. RencanaTindakan Lanjut .....	24
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai. Diharapkan laporan ini memberikan informasi mengenai simpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Koperasi dan UKM di tahun mendatang

Pembangunan Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Banggai mulai dibangkitkan melalui program pemberdayaan masyarakat yang menitik beratkan pada pengembangan ekonomi masyarakat, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM) dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dan mendorong berkembangnya KUMKM melalui 4 akses (sumber daya, teknologi, informasi pasar dan pembiayaan) serta 5 faktor pendorong (memanfaatkan SDM, kualitas SDM, Penguasaan IT dan produktifitas, sumber permodalan dan pemasaran produksi). Pemberdayaan Koperasi dan KUMKM mempunyai peran yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha serta pemenuhan hak atas pekerjaan yang secara langsung ikut serta dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Ciri-ciri Organisasi Koperasi secara sosial-ekonomi membentuk struktur organisasi koperasi yang unik dan menggambarkan suatu sistem sosial ekonomi yang melibatkan anggota, perusahaan koperasi dan pasar sedemikian rupa dan membentuk sistem koperasi. Sesuai dengan UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 ciri-ciri Koperasi Indonesia secara umum adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis dan pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan jasa masing-masing anggota.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas secara umum dituangkan dalam penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai memiliki tugas dan fungsi merumuskan kebijakan teknis Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai Tahun 2018 sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Luwuk disusun berdasarkan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021.

## **1.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai adalah unsur pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan dibidang Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Dalam melaksanakan fungsinya, Struktur Organisasi Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi seorang Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, 9 orang Kepala Seksi, 2 orang Kepala Sub Bagian dan yang dapat dijabarkan sebagaimana Struktur dan Tabel di bawah ini

Tabel 1 : Daftar Nama, Jabatan dan Eselon menurut lingkup Tugas Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai.

No	Jabatan	Eselon	Jumlah 1-1 2016	Ket
1.	Kepala Dinas	II/b	1	
2.	Sekretaris	III/a	1	
	a. Kasubag Umum, Kepegawaian dan Aset	IV/a	1	
	c. Kasubag Evaluasi Perencanaan dan Keuangan	IV/a	1	
3.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	III/b	1	
	a. Kasi Kelembagaan dan Perizinan	IV/a	1	
	b. Kasi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP	IV/a	1	
	c. Kasi Keanggotaan dan Penerapan Aturan	IV/a	1	
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	III/b	1	
	a. Kasi Fasilitas Usaha Koperasi	IV/a	1	
	b. Kasi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	IV/a	1	
	c. Kasi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi	IV/a	1	
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	III/b	1	
	a. Kasi Fasilitas Usaha Mikro	IV/a	1	
	b. Kasi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro	IV/a	1	
	C Kasi Peningkatan Kualitas	IV/a	1	



Tabel 2 : Jumlah Pejabat Struktural dan Staf Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Posisi 1 Januari 2017 dan 31 Desember 2017

Pegawai	Tambah	Posisi Per 31-12 2017	Ket
A. Pejabat Struktural			
1. Kepala Dinas	-	1	
2. Sekretaris	-	1	
3. Kepala Bidang	-	3	
4. Kepala Seksi	-	9	
5. Kasubag	-	2	
B. Staf	-	15	
C. Tenaga Honorer	-	10	
		43	

### I.3 Isu Strategis

Koperasi dan UKM merupakan bagian penting yang mencerminkan akan kemajuan kesejahteraan bagian terbesar rakyat Banggai khususnya masyarakat di Kabupaten Banggai. Ini mengingat besarnya potensi UMKM yang ditunjukkan oleh keberadaannya sejumlah 6.299 Usaha Mikro pada tahun 2018 dengan kegiatan usaha mencakup hampir semua lapangan usaha, serta tersebar diseluruh Kecamatan di Kab. Banggai. Oleh Karena itu, pemberdayaan dan pembinaan koperasi dan usaha mikro menjadi semakin strategis untuk mendukung peningkatan produktivitas, penyediaan lapangan kerja yang lebih luas, dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh sektor dengan produktivitas yang rendah seperti sektor pertanian, perdagangan dan industri rumah tangga. Secara umum UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas sumberdaya seperti kurang terampilnya SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan, rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen, serta informasi pasar. Masalah SDM ini akan berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas pengelolaan manajemen. Demikian pula keterbatasan akses kepada modal masih akan dihadapi sebagian besar UKM terutama kredit investasi. Untuk menentukan strategi perlu memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal.

## B.1 Lingkungan Internal

### B.1.1 Kekuatan (Strenghts)

- a. Struktur Organisasi yang lengkap;
- b. Adanya Peraturan dan Perundang-undangan Daerah sebagai landasan kegiatan organisasi;
- c. Dukungan dan komitmen pimpinan untuk menegakkan birokrasi yang efisien dan efektif serta akuntabel;
- d. Dukungan politik dari masyarakat, pemerintah daerah dan legislatif;
- e. Perkembangan Koperasi di Kabupaten Banggai.

### B.1.2 Kelemahan ( Weaknesses )

- a. Kualiatas SDM yang belum merata dan memadai;
- b. Semangat kerja dan disiplin beberapa staf masih rendah;
- c. Dana Operasional relatif terbatas;
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## B.2 Lingkungan Eksternal

### B.2.1 Peluang (Opportunities)

- a. Pelaksanaan otonomi daerah yang lebih baik disertai perimbangan keuangan yang lebih adil akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk memberdayakan KUMKM sebagai motor penggerak perekonomian daerah;
- b. Perubahan struktur perekonomian daerah dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa menciptakan peluang bagi KUMKM terutama di bidang agrobisnis, agroindustri, kerajinan industri, dan industri-industri lainnya dimana KUMKM dapat berfungsi sebagai sub kontraktor yang kuat dan efisien bagi usaha besar;
- c. Meningkatnya kesadaran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat akan arti penting KUMKM dalam perekonomian akan meningkatkan komitmen dan keberpihakan dalam prioritas pembangunan;

- d. Pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin tinggi, dan makinterbukanya perekonomian dunia, serta makin pesatnya kerjasama ekonomi antar Negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC juga akan menciptakan peluang baru bagi KUMKM;
- e. Kondisi aman dan kondusif.

#### B.2.2 Ancaman /tantangan (Threats)

- a. Bertambahnya pelaku pasar multinasional yang sangat inovatif sehingga terjadi persaingan yang ketat di pasar dalam negeri dan internasional;
- b. Pemberdayaan KUMKM menghadapi kendala berupa rendahnya kualitas SDM yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan dan rendahnya produktivitas serta daya saing KUMKM;
- c. Belum efektifnya mekanisme pasar yang berkeadilan;
- d. Keterbatasan Anggaran Daerah untuk menstimulan pembangunan ekonomi;
- e. Iklim usaha yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pemberdayaan KUMKM.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Banggai sangat menyadari pentingnya pembangunan di bidang ekonomi melalui ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Dengan pemikiran tersebut kedepan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai memfokuskan pembangunan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan dan pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah meliputi langkah-langkah dan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatnya Koperasi yang Aktif dan kelembagaannya berkualitas
2. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia dalam mengelola koperasi
3. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap koperasi

4. Meningkatnya Daya Saing KUMKM
5. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro

Meningkatnya kemitraan KUMKM dengan pengusaha besar, BUMD, BUMN dan swasta yang didukung oleh kebijakan pengembangan iklim usaha yang kondusif, pengembangan kewirausahaan dan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi sangat kita harapkan, dimana kemitraan usaha bertujuan untuk menumbuhkan struktur dunia usaha yang lebih kokoh dan efisien, sehingga dapat menguasai dan mengembangkan pasar sekaligus meningkatkan daya saing baik pasar lokal, regional maupun global. Dari segi Kelembagaan Ekonomi, telah tumbuh dan berkembang Lembaga Keuangan Mikro di Banggai yang dapat berupa Koperasi Simpan Pinjam dan unit simpan pinjam Koperasi, dan sebagainya.

#### **I.4 Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai Tahun 2018 didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Luwuk.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 14 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah Kabupaten Banggai, seperti diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disusun sebagai upaya untuk menyiasati keterbatasan sumber daya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2016-2021 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapanyang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangundanganuntuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

##### 2.1.1 Visi

Secara singkat disampaikan visi dan misi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 adalah “ **Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya**“

##### 2.1.2. Misi

Penjabaran lebih konkrit visi pembangunan dalam Misi Pembangunan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih menuju Pemerintahan yang Berwibawa.
2. Mengembangkan Pertanian Melalui Pemanfaatan Teknologi Pertanian.
3. Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah
4. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata.
5. Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Budaya dan Kearifan Lokal.
6. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Daya Saing Daerah.

### **2.1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan stratejik merupakan penjabaran dari pernyataan Misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan stratejik ini maka dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah Kab. Banggai untuk kurun waktu lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini juga akan memungkinkan Dinas untuk mengukur sejauh mana kinerja organisasi telah dicapai.

Sasaran stratejik Dinas Koperasi dan UKM merupakan penjabaran dari Visi dan Misi serta Tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja (Performance Plan). Penetapan sasaran stratejik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap - tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran stratejik Dinas Koperasi dan UKM merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik serta sebagai landasan untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Dinas

Koperasi dan UKM. Sasaran - sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan juga tujuan telah dapat dicapai.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini (LKjIP) periode tahun 2018 ini perlu disampaikan bahwa terdapat beberapa *Tujuan dan Sasaran* Strategis yang tidak dijabarkan pada *LKjIP* periode-periode sebelum ini.

Pada masing - masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran. Seperti halnya sasaran terhadap tujuan, program - program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program Dinas Koperasi dan UKM dapat dijabarkan sebagai berikut.

Mengacu pada Visi dan misi Pembangunan dimaksud, maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai menjabarkan secara lebih rinci Tujuan dan sasaran strategis ke dalam rencana strategis (Renstra) Reviwe Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2016-2021, sebagai upaya untuk mendukung tercapainya visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Banggai.

Tabel 3 . Rencana Strategis Reviwe SAKIP  
Dinas Koperasi dan UKM Kab. Banggai

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET PERTAHUN						PROGRAM
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Meningkatkan Koperasi dan Usaha Mikro Yang Mandiri Berdaya saing	-Persentase Koperasi Aktif	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	- Persentase Koperasi Aktif	%	22,76	23,73	25,42	36,02	46,61	57,20	1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan
	-Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	Meningkatnya Usaha Mikro Yang berdaya saing	- Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil	%	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	2. Penciptaan iklim usaha Mikro yang kondusif 3. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro 4. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro



## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama, Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Banggai berpedoman pada pedoman umum Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Banggai menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama dalam SK Kepala Dinas Koperasi dan UKM No : 900/25.2/Diskop/2018 yang telah di selaraskan dengan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai

Adanya perubahan / penambahan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut untuk menyesuaikan dengan Reviu Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai 2016 - 2021. Hal penting yang harus dipahami bahwa orientasi akuntabilitas kinerja tidak lagi sekedar berapa dana yang telah dan akan dihabiskan, tetapi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai pada akhir periode perencanaan.

Berikut ini dijabarkan indikator kinerja utama untuk setiap sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai serta periode pencapaiannya.

Tabel. 4. Indikator Kinerja Utama Reviwe SAKIP  
Dinas Koperasi dan UKM KAb. Banggai

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Aktif	Jumlah Koperasi Aktif / Jumlah Koperasi x 100 %	( Data Keragaan Koperasi ) - Bidang Kelembagaan dan Pengawasan - Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
Meningkatnya Usaha Mikro Yang berdaya saing	Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil /usaha mikro yang dibina thn N x 100%	- Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

## 2.3 Rencana Kerja Tahunan

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategik tahun 2016 - 2021 yang sudah dijelaskan diatas, Dinas Koperasi dan UKM menetapkan target untuk masing - masing sasaran yang harus dicapai. Target ini dituangkan dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) tahun 2018.

Target ditetapkan untuk setiap indikator kerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran, program maupun indikator kinerja tingkat kegiatan (input, output, outcome, benfid, inpac) Ikhtisar Rencana Kinerja Tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 5. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Banggai

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target (Tahun Ke-N) 2018	Program
1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Aktif	25,42 %	Peningkatan Kualitas Kelembagaan
2	Meningkatnya Usaha Mikro Yang berdaya saing	Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil	0,02%	-Penciptaan iklim usaha mikro yang kondusif -Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro - Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

## 2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun, disamping itu juga merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran ( **budgetin**) selesai dan disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya ( **Performnt Agreeme**).

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai Tahun 2018 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran dan rencana atau target capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai.

Disamping itu dokumen Perjanjian Kinerja juga memuat informasi tentang program dan kegiatan serta anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran dimaksud. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai untuk Tahun 2018, secara rinci dapat dilihat pada formulir Perjanjian Kinerja terlampir.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas , perlu menetapkan indikator kinerja utama (key performance indicators) di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai, dengan tujuan : Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Dan Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditentukan dilakukan dengan membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja. Indikator Kinerja Utama dan Pencapaian IKU Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai pada tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel 4.2 sebagai berikut :

**Tabel. 6 Indikator Kinerja Utama**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Aktif	Jumlah Koperasi Aktif / Jumlah Koperasi x 100 %	( Data Keragaan Koperasi ) - Bidang Kelembagaan dan Pengawasan - Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
Meningkatnya Usaha Mikro Yang berdaya saing	Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil /usaha mikro yang dibina thn N x 100%	- Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan IKU. Instansi Pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

**Tabel. 7. Capaian Kinerja Indikator Utama**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2017	Satuan	Capaian Tahun 2018			Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Koperasi Aktif	23.73%	Persentase	25,42 %	33,89 %	175 %	Sangat Baik
Persentase Skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	0.02 %	Persentase	0.02 %	0.02 %	100 %	Baik

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa dari target yang telah ditetapkan oleh semua indikator dapat tercapai bahkan melebihi target. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai , meskipun demikian perlu peningkatan kinerja yang lebih baik lagi.

### 3.2 Target dan Capaian

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai Tahun 2018 memuat capaian target-target yang terukur dari perolehan masing-masing indikator-indikator kinerja. Penilaian ini

dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

#### 1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi

Tolak ukur capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi mempunyai indikator **Persentase koperasi aktif**, Indikator tersebut telah terealisasi sebesar 33, 89 % dari target 25,42 %. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang baik karena sudah mencapai 175 % dari target tahun terakhir Renstra. Koperasi aktif merupakan koperasi yang berkualitas dan sehat. Penilaian koperasi berkualitas bertujuan untuk melihat performadan mengukur kinerja koperasi. Beberapa faktor pendukung yang menjadi dasar penilaian adalah dari segi kelembagaan dan segi usahanya. Secara umum keadaan koperasi di Kabupaten Banggai sudah memiliki kelembagaan yang baik dan usahanya meningkat. Hal ini terkait beberapa Koperasi dalam pencapaian target baru menunjukkan keaktifan kelembagaan dengan terlaksananya Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang menjadi salah satu penilaian kategori untuk koperasi aktif, dari jumlah 236 Koperasi yang ada 80 koperasi sudah melaksanakan RAT dan ada 14 koperasi yang telah memiliki sertifikat nomor induk koperasi dari 154 Koperasi yang memiliki nomor induk koperasi pada tahun 2018, pencapaian ini telah meningkat dari tahun sebelumnya dengan hanya 56 koperasi yang melaksanakan RAT dari target 60 koperasi yang melaksanakan RAT dan 2 koperasi yang memiliki sertifikat nomor induk koperasi dari 140 koperasi yang memiliki nomor induk koperasi di tahun 2017, namun dari segi penilaian kesehatan beberapa koperasi belum menunjukkan keadaan yang baik. Kondisi kelembagaan koperasi tersebut adalah sebagai keberhasilan dalam melakukan pembinaan-pembinaan yang optimal. Sedangkan penilaian kesehatan Koperasi bertujuan untuk mengetahui

tingkat kesehatan Koperasi agar dalam pengelolaan keuangannya berjalan sesuai dengan aturan. Pada umumnya koperasi menunjuka nyang dinilai kesehatannya menunjukkan kondisi yang sangat baik. Capaian Kinerja Jumlah Koperasi aktif didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi, Kegiatan Pembinaan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Kegiatan. Indikator Kinerja ini juga didukung Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan kegiatan, Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Koperasi serta Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD.

**Tabel 8. Data Perkembangan Koperasi di Kabupaten Banggai**

No	Uraian	2017	2018
1	Jumlah Koperasi	236	245
2	Jumlah Koperasi Aktif	200	119
3	Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT	56	80
4	Jumlah Koperasi yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK)	140	154
5	Jumlah Koperasi yang memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	2	14

## 2. Meningkatnya Usaha mikro yang berdaya saing

Tolak ukur capaian sasaran Meningkatnya Usaha mikro yang berdaya saing terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu **Persentase Skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil**. Indikator Kinerja Persentase Skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil pada tahun 2018 dari target 0.02 % usaha mikro terealisasi 0.02% atau mencapai 100%. Capaian kinerja tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah dukungan dari berbagai sektor, baik dari Pemerintah, dunia usaha dan perbankan untuk menjadi mitra kerja KUMKM dari segi permodalan maupun pemasaran melalui Temu Kemitraan dan promosi produk KUMKM. Pemerintah melaksanakan

kegiatan tersebut agar terjalin kerjasama antara Usaha Mikro dengan dunia usaha, perbankan melalui pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan usaha Kecil Menengah dan Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk usaha mikro kecil dan menengah dan Kegiatan Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal.

Meningkatnya skala usaha Usaha Mikro disebabkan karena indikator peningkatan usaha kecil sebesar 2.277 usaha kecil menjadi 2.279 usaha kecil pada tahun 2018 peningkatan sebesar 0.02 %, peningkatan skala usaha mikro ke skala usaha kecil tersebut di alami oleh 2 usaha mikro antara lain usaha mikro Wahyu denan usaha aneka produk kripik dan usaha mikro Aulia food dengan jenis usaha yang sama yakni aneka produk kripik. Peningkatan juga terjadi pada pertumbuhan usaha mikro dari jumlah usaha 6.299 usaha mikro pada tahun 2017 menjadi 8.134 usaha mikro di tahun 2018 dengan kenaikan jumlah usaha mikro binaan yang sebelumnya berjumlah 98 usaha mikro menjadi 138 binaan usaha mikro.

**Tabel. 9. Perkembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil**

No	Jenis Usaha	2017	2018	Keterangan
1	Jumlah Usaha Mikro	6.299	7.974	Usaha mikro baru berjumlah 1.835
2	Usaha Mikro Binaan	98	138	Penambahan usaha mikro binaan
3	Usaha Kecil	2.277	2.279	Peningkatan usaha mikro yang naik skala usaha kecil berjumlah 2 usaha mikro



### 3.2.1 Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Banggai tahun 2018 dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 10. Realisasi Anggaran dan Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	( % )
1.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Aktif	Rp. 609.497.000	Rp. 607.110.508	99.60
2.	Meningkatnya Usaha Mikro Yang berdaya saing	Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil	Rp. 1.062.210.500	Rp. 1.055.389.951	99.35

Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Kab. Banggai tahun 2018 terhadap program penunjang sasaran strategis dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 11. Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan

No	Program Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Rp. 873.909.600</b>	<b>Rp. 864.298.964</b>	<b>98.90</b>
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 9.650.000	Rp. 9.649.800	100
	- Penyediaan Jasa Komudikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 65.026.130	Rp. 52.991.920	85.16
	- Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Rp. 7.150.000	Rp. 6.381.000	99.70
	- Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Rp. 54.818.000	Rp. 54.818.000	100

	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 28.000.000	Rp. 28.000.000	100
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 18.923.750	Rp. 18.923.400	100
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Rp. 4.191.000	Rp. 4.191.000	100
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	100
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 14.990.000	Rp. 14.990.000	100
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp. 268.212.020	Rp. 267.872.962	99.87
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp. 194.698.700	Rp. 194.680.882	99.99
	- Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Rp. 210.150.000	Rp. 208.800.000	100
2	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Rp. 362.480.000</b>	<b>Rp. 362.477.270</b>	<b>99.99</b>
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp. 27.975.000	Rp. 27.975.000	100
	- Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp. 57.000.000	Rp. 57.000.000	100
	- Pengadaan meubelair	Rp. 0	Rp. 0	-
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp. 225.000.000	Rp. 225.000.000	100
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 32.000.000	Rp. 31.997.270	99.99
	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp. 5.880.000	Rp. 5.880.000	100
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp. 14.625.000	Rp. 14.625.000	100
3	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Rp. 149.770.000</b>	<b>Rp. 149.750.000</b>	<b>99.98</b>
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp. 48.000.000	Rp. 48.000.000	100
	- Pengadaan pakaian khusus	Rp. 101.770.000	Rp. 101.750.000	99.98

	hari-hari tertentu			
4	<b>Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS</b>	<b>Rp. 7.000.000</b>	<b>Rp. 6.930.800</b>	<b>99.01</b>
	- Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Rp. 7.000.000	Rp. 6.930.800	99.01
5	<b>Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Rp. 20.677.500</b>	<b>Rp. 20.677.500.</b>	<b>100</b>
	- Pendidikan dan pelatihan formal	Rp. 15.500.000	Rp. 15.500.000	100
	- Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur	Rp. 5.177.500	Rp. 5.177.500	100
6	<b>Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Rp. 72.132.500</b>	<b>Rp. 71.957.100</b>	<b>99.76</b>
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp. 10.602.500	Rp. 10.554.000	99.54
	- Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Rp. 11.602.500	Rp. 11.554.300	99.58
	- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp. 11.752.500	Rp. 11.704.300	99.59
	- Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	Rp. 47.675.000	Rp. 38.144.500	99.92
7	<b>Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif</b>	<b>Rp.135.120.000</b>	<b>Rp. 133.564.900.</b>	<b>98.85</b>
	- Sosialisasi Kebijakan Tentang UKM	Rp. 64.800.000	Rp. 63.288.750	97.67
	- Fasilitasi Pengembangan UKM			
8	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM</b>	<b>Rp. 70.320.000</b>	<b>Rp. 70.276.150</b>	<b>99.94</b>
	- Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Rp. 560.262.500	Rp. 547.119.951	99.14
	- Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD	Rp. 139.764.500	Rp. 139.734.900	99.98
9	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM</b>	<b>Rp. 375.228.000</b>	<b>Rp. 374.705.100</b>	<b>99.86</b>

	- Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM	Rp. 81.000.000	Rp. 81.000.000	100
	- Penyelenggaraan promosi produk UMKM	Rp. 151.268.000	Rp. 128.913.400	99.94
	- Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	Rp. 148.020.000	Rp. 164.791.700	99.73
10	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>Rp. 493.732.500</b>	<b>Rp. 491.375.608</b>	<b>99.52</b>
	- Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Rp. 199.530.000	Rp. 192.816.008	99.12
	- Pembagunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	Rp. 39.075.000	Rp. 39.075.000	100
	- Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Rp. 25.327.500	Rp. 25.297.500	99.88
	- Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Rp. 161.137.500	Rp. 160.589.500	99.66
	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Rp. 66.462.500	Rp. 73.597.600	99.91

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Secara umum Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten banggai, telah sepenuhnya memenuhi seluruh sasaran yang telah ditetapkan dari 4 sasaran yang telah ditentukan. Fungsi utama yang diharapkan dapat dijalankan oleh Dinas Koperasi dan UKM yaitu berbagai kegiatan pelatihan dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia Koperasi itu sendiri, yang nanti diharapkan mampu tampil sebagai kader Koperasi, memiliki dan memahami jati diri Koperasi dalam perannya sebagai Pengurus, Pengawas maupun Anggota.

Fungsi lain yang perlu dapat dijalankan dengan baik yaitu peningkatan Koordinasi. Hal ini dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan kegiatannya diperlukan sinergisme dengan Instansi Terkait lainnya serta dukungan dana yang dapat mendorong peningkatan kinerja lebih baik sehingga berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dipadukan dan saling memperkuat, yang bermuara pada semakin tertatanya program pembinaan dilapangan.

#### **4.2 Rencana Tindak Lanjut**

Untuk lebih efektifnya pelaksanaan pencapaian sasaran yang belum tercapai, maka ada beberapa penyelesaian yang akan ditempuh yaitu :

1. Melakukan identifikasi terhadap kondisi kelembagaan dan usaha KUKM. Hal ini penting mengingat berbagai program dan kegiatan yang akan dilakukan, selalu memperhatikan kondisi dan keberadaan KUKM itu sendiri yang disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya.
2. Regulasi dalam bentuk pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP perlu terus dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk kepedulian Pemerintah dalam melindungi Koperasi maupun nasabah/anggota Koperasi dari resiko atas modal yang mereka investasikan.
3. Upaya pemberdayaan Koperasi perlu terus dilakukan sehingga semakin berkualitas performance kelembagaan maupun usahanya.

4. Guna mendukung sekaligus memperkuat posisi power KUKM guna memainkan perannya sebagai pelaku ekonomi dalam perekonomian Daerah dan Nasional. Sudah saatnya Pemerintah Daerah perlu memperhatikan, terutama dalam perkuatan permodalan, perangkat kebijakan untuk peluang kemitraan dan keterkaitan usaha serta kebijakan - kebijakan lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja KUKM.



